



KEPAHIANG

MINGGU, 21 AGUSTUS 2022

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

APBD Tidak Mampu Biayai Proyek Mangkrak

KEPAHIANG – Tiga link jalan eks SMI yakni jalan pusat perkantoran-Barat Wetan, jalan Renah Kurung-Batu Bandung, dan jalan Desa Cinto Mandi-Langgar Jaya-Damar Kencana dan Waterpark yang berlokasi di Kecamatan Kabawetan akan benar-benar terbengkalai. Sebab jika lanjutan pekerjaan di Dinas PUPR dan Disparpora itu hanya mengandalkan APBD Kepahiang, dipastikan tidak akan terlaksana.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda ada anggaran lebih dalam APBD Kepahiang 2023 untuk pekerjaan fisik di kedua OPD tersebut. Bahkan defisit kisaran Rp 195.503.487.666.

Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Haryanto, S.Kom, MM mengatakan pembangunan 3 link jalan eks SMI dan Waterpark seyogyanya harus menggunakan APBD Kepahiang karena tidak diperbolehkan untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan itupula seharusnya sebelum melakukan

pembangunan Kabupaten Kepahiang harus melihat dulu situasi dengan kondisi keuangan.

“Untuk 3 link jalan eks SMI sebelumnya menggunakan dana pinjaman, penuntasan pembangunan wacananya juga akan menggunakan dana pinjaman. Sementara dana pinjaman tidak terealisasi, artinya menggunakan APBD, karena tidak bisa menggunakan DAK untuk melanjutkan pembangunan tersebut,” jelas Haryanto.

Hal yang sama juga untuk kelanjutan pembangunan Waterpark yang harus menggunakan APBD Kepahiang, karena sebelumnya menggunakan APBD Kepahiang. Kecuali memang sebelumnya dibangun menggunakan anggaran DAK, dan tahap lanjutan juga bisa menggunakan DAK. Tapi untuk sekarang itu harus APBD Kepahiang.

“Memang untuk kedua pembangunan fisik tersebut dilema, karena untuk kelanjutan pembangunan den-

gan menggunakan APBD Kepahiang dipastikan tidak akan mampu,” ujar Haryanto.

Dijelaskan Haryanto, untuk APBD Kabupaten Kepahiang TA 2023 mendatang belum adanya tampak anggaran lebih untuk pembangunan fisik dan bahkan defisit yang sekarang cukup besar dan mencapai Rp 195.503.487.666. Selanjutnya, di tahun 2024 juga masih sama dengan tahun 2023, Kabupaten Kepahiang harus menyiapkan hibah untuk keperluan Pilkada Kabupaten Kepahiang dan itu anggarannya dari APBD Kepahiang.

“Jadi memang cukup sulit untuk melanjutkan pembangunan fisik di 2 OPD tersebut,” tambah Haryanto.

Kendati demikian, harapan besar tetap berada kepada kedua OPD tersebut, yakni Dinas PUPR dan Disparpora supaya bisa mencari jalan keluarnya sehingga pembangunan yang sebelumnya sudah jadi walaupun belum tuntas bisa

dilanjutkan. Jika tidak maka, bangunan yang sebelumnya tersebut akan rusak kembali dan terbengkalai.

“Kami berharap, bupati melalui OPD terkait cari celah lain, karena kami anggap mereka lebih paham. Jika tidak dilanjutkan, jalan rusak lagi, serta waterpark tidak dijamin lagi kekuatannya,” harap Haryanto.

Untuk diketahui, untuk melanjutkan pembangunan 3 link jalan eks SMI Dinas PU Kepahiang membutuhkan anggaran kisaran Rp 40 miliar. Sementara Disparpora membutuhkan anggaran Rp 10 miliar dan itupun belum tuntas 100 persen. Karena untuk menuntaskan pembangunan waterpark Kabawetan hingga 100 persen membutuhkan dana Rp 57 miliar lagi. Versinya kedua OPD Kepahiang, sekarang pihaknya mulai melakukan langkah lain dengan harapan baik jalan maupun waterpark bisa dilanjutkan pembangunannya.(sly)